

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN

FOCUS GROUP DISCUSSION

“Menuju Pemilu 2024 Yang Berkualitas”



Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Juni 2023

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kajian ilmu politik, sistem pemilu diartikan sebagai suatu kumpulan metode atau suatu pendekatan dengan mekanisme prosedural bagi warga masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka.

Pemilihan umum menjadi tolak ukur berjalannya proses demokratisasi. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan maka penyelenggaraan pemerintahan di daerah pun diterapkan dengan prinsip demokrasi. Sesuai dengan pasal 18 ayat 4 UUD 1945, kepala daerah di pilih secara demokratis. Dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang di pilih langsung oleh rakyat, yang di ajukan oleh partai politik atau gabungan parpol. Sedangkan di dalam perubahan UU No.32 Tahun 2004, yakni UU No.12 Tahun 2008 Pasal 59 ayat (1) b, calon kepala daerah dapat juga diajukan dari calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah periode pertama berlangsung sepanjang tahun 2005-2008, sedangkan periode kedua pemilukada berlangsung sepanjang tahun 2010-2013. Dari periode pertama tersebut banyak pembelajaran yang bisa dipetik untuk perbaikan sistem pemilukada. Sedangkan dalam perkembangannya pada periode kedua pelaksanaan pemilukada banyak diwarnai adanya konflik yang mencerminkan bahwa sistem pemilukada membutuhkan sebuah regulasi yang tepat agar pelaksanaannya bisa lebih efektif dan efisien dalam hal anggaran maupun kesiapan lembaga-lembaga penyelenggara pemilihan umum ditingkat daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, melihat fenomena tersebut Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan Program Studi Administrasi Publik Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Menuju Pemilu 2024 Yang Berkualitas” sebagai bentuk dukungan dalam peningkatan kemampuan mahasiswa.

TUJUAN

- Memberikan wawasan dan pengetahuan terkait sistem penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabel

MEDIA DAN WAKTU KEGIATAN

- Hari, Tanggal : Senin, 26 Juni 2023
- Waktu : 11.00 - selesai
- Media : Offline
- Tempat : Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan
- Biaya : Free
- Fasilitas : Ilmu yang bermanfaat

PESERTA PELATIHAN

FGD diikuti oleh ASLAB dan HIMA Prodi Administrasi Publik

PEMBICARA

1. Nanang Haromin, S.sos. (Pengamat Politik)

SUSUNAN KEGIATAN

1. Pembukaan
2. Pemaparan Materi
3. Diskusi
4. Penutup

PENUTUP

Demikian proposal kegiatan FGD ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 20 September 2023
Ketua Program Studi
Administrasi Publik


ILMI USROTIN C, M.AP


Mengetahui,
Dekan
Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial


POPPY FEBRIANA, S.Sos, M.Med.Kom


FOTO KEGIATAN

